

Jurnal Sosial Humaniora Terapan

Volume 1 | Issue 1

Article 1

Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Debrina Vita Ferezagia

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, debrinaferezagiaa@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht>

Recommended Citation

Ferezagia, Debrina Vita (2018) "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 1: Iss. 1, Article 1.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Vocational Education Program at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Sosial Humaniora Terapan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Debrina Vita Ferezagia

Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Email : debrinaverezagia@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokan provinsi di Indonesia bedasarkan indikator kemiskinan. Data yang digunakan adalah data cross section tahun 2017, meliputi indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan presentase penduduk miskin. Metode yang digunakan adalah analisis multivariat yaitu analisis *non hierarki* dan *hierarchy cluster*. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ditingkat provinsi dikelompokan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Kelompok 2 yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku. Kelompok 3 terdiri dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Berdasarkan analisis kluster, provinsi dengan indeks kemiskinan tinggi berada pada kelompok 3, kemiskinan sedang berada dalam kelompok 2, dan indeks kemiskinan rendah berada dalam kelompok 1.

Kata Kunci: analisis cluster, indeks keparahan kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, presentase penduduk miskin

Abstract

Poverty Rate Analysis in Indonesia. The purpose of this study is to categorize provinces in Indonesia based on indicators of poverty. The data used are cross section data of 2017. The variables are poverty severity index, poverty gap index, headcount index. The method used is Non-hierarchy dan hierarchy cluster analysis. Based on the analysis can be concluded that the provincial level of poverty is grouped into 3 groups. Group 1 are the province of East Nusa Tenggara, West Papua and Papua. Group 2 are Aceh, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, Gorontalo, West Sulawesi and Maluku. Group 3 consists of North Sumatra, West Sumatra, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Riau, DKI Jakarta, West Java, Banten, Bali, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi and North Maluku. Based on cluster analysis, provinces with high poverty index were in group 3, poverty was in group 2, and the low poverty index was in group 1.

Keywords: cluster analysis, poverty severity index, poverty gap index, headcount index

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015).

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penangan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan 3 indikator kemiskinan. Dengan demikian, diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menerapkan program tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau disebut juga batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut (World Bank, 2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Menurut Adisasmita, (2005) indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit (BPS, 2018).

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right] \quad \dots \dots \dots [1]$$

Di mana:

P_1 =Indeks kedalam kemiskinan

Z =Garis kemiskinan

Y_1 =rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berasa di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_1 < z$

q =banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n =jumlah penduduk

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0 \quad \dots \dots \dots [3]$$

P_0 =Presentase penduduk miskin (*head count index*)

Z =Garis kemiskinan

Y_1 =rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berasa di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_1 < z$

q =banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n =jumlah penduduk

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) adalah indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2018).

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2 \quad \dots \dots \dots [2]$$

Di mana:

P_2 =Indeks keparahan kemiskinan

Z =Garis kemiskinan

Y_1 =rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berasa di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$); $y_1 < z$

q =banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n =jumlah penduduk

Persentase Penduduk Miskin (*Headcount Index/P0*) adalah Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. (BPS, 2018)

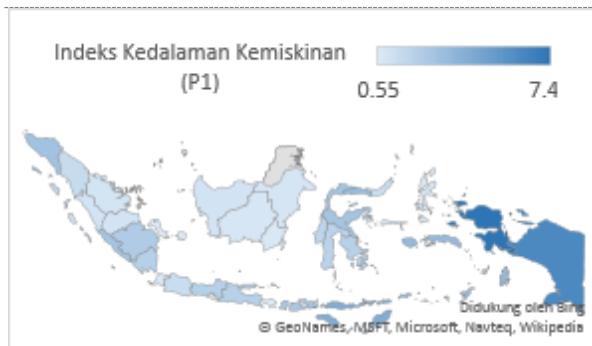
METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan adalah indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan dan presentase penduduk miskin. Data diambil pada bulan September 2017. Analisis yang dilakukan dengan analisis deskriptif dengan *map chart* dan analisis cluster.

Analisis cluster merupakan metode multivariat yang mempunyai tujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik (Hair et al, 2006). Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama (Chen, 2008). Dua metode dalam analisis ini adalah metode hirarkhi dan metode non hirarkhi. Pada penelitian ini menggunakan kombinasikan kedua metode. Pertama gunakan metode hirarkhi kemudian dilanjutkan dengan metode non hirarkhi.

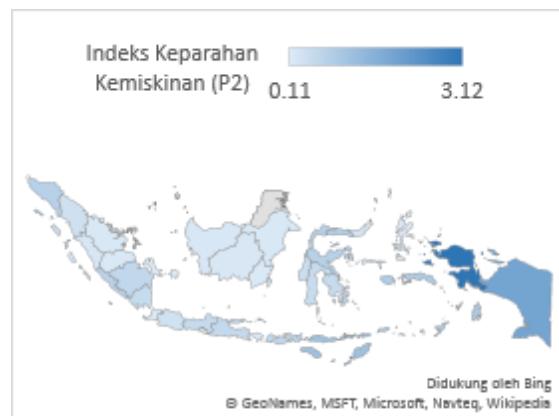
HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika deskriptif dengan *map chart* diterapkan untuk melihat penyebaran indeks kedalam, indeks keparahan dan presentase penduduk miskin di indonesia. Gambar 1 menunjukkan penyebaran indeks kedalaman kemiskinan, berkisar antara 0.55-7.4. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan diwakilki oleh degradasi warna yang semakin gelap. Berdasarkan hasil analisis terlihat bawah provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah pada provinsi Bali (0.55), sedangkan kedalam kemiskinan tertinggi pada provinsi Papua Barat (7.4). Provinsi-provinsi di Indonesia dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan 5 tertinggi secara berurutan yaitu Papua Barat (7.41), Papua (6.25), Nusa Tenggara Timur (4.16), Maluku (3.41) dan Gorontalo (3.31).



Gambar 1. Indeks Kedalaman kemiskinan

Gambar 2 menunjukkan indeks keparahan kemiskinan di Indoensia, semakin parah kemiskinan suatu provinsi maka ditunjukkan oleh degradasi warna yang semakin gelap. Provinsi dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi berturut-turut provinsi Papua barat (3.12), Papua (1.93), Nusa Tenggara Timur (1.17), Maluku (0.89) dan Gorontalo (0.85). Provinsi dengan indeks keparahan kemiskinan terendah yaitu provinsi Kep. Bangka Belitung.



Gambar 2. Indeks Keparahan kemiskinan

Gambar 3 menggambarkan penyebaran persentase penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan map chart terlihat bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin paling sedikit pada provinsi DKI Jakarta 3.78%. Provinsi dengan persentase penduduk miskin paling besar berturut-turut adalah Papua (27.76%), Papua Barat (23.12%), Nusa Tenggara Timur (21.38%), Maluku (18.29%) dan Gorontalo (17.14%).



Gambar 3. Presentase penduduk miskin

Analisis kemiskinan suatu provinsi dengan 3 indikator dilakukan dengan cara mengelompokan berdasarkan indikator-indikator tersebut. Indikator kedalaman, keparahan dan persentase penduduk miskin secara multivariat merupakan indikator untuk kemiskinan, oleh sebab itu analisis juga dilakukan secara multivariat. Analisis cluster digunakan untuk mengelompokkan obyek 37 provinsi di Indonesia dberdasarkan 3 indikator. Berdasarkan analisis cluster non hierarki terbentuk 3 kelompok. kelompok 1 terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Kelompok 1 terdiri dari provinsi yang meliki indeks keparahan, indeks kedalam dan presentase penduduk miskin paling tinggi dibandingkan kelompok 2 dan 3. Rata-rata nilai indeks kedalaman (p1) sebesar 5.94, indeks keparahan (p2) sebesar 2.073 dan presentase penduduk miskin 24.087%.

Tabel 1. Provinsi pada Cluster 1

PROVINSI	P1	P2	P0
NUSA TENGGARA			
TIMUR	4.16	1.17	21.38
PAPUA BARAT	7.41	3.12	23.12
PAPUA	6.25	1.93	27.76

Provinsi pada cluster 2 merupakan provinsi dengan rata-rata nilai indicator sedang. Cluster 2 terdiri atas 13 provinsi Tabel 2. Rata-rata nilai indeks kedalaman (P1) sebesar 2.502, indeks keparahan (p2) 0.641 dan persentase penduduk miskin 13.945%.

Tabel 2. Provinsi pada Cluster 2

PROVINSI	P1	P2	P0
ACEH	2.92	0.78	15.92

SUMATERA SELATAN	2.4	0.63	13.1
BENGKULU	2.76	0.71	15.59
LAMPUNG	2.11	0.53	13.04
JAWA TENGAH	2.11	0.55	12.23
DI YOGYAKARTA	2.09	0.46	12.36
JAWA TIMUR	2.09	0.56	11.2
NUSA TENGGARA BARAT	2.63	0.63	15.05
SULAWESI TENGAH	2.8	0.78	14.22
SULAWESI TENGGARA	2.09	0.52	11.97
GORONTALO	3.31	0.85	17.14
SULAWESI BARAT	1.81	0.45	11.18
MALUKU	3.41	0.89	18.29

Provinsi pada cluster 3 merupakan provinsi dengan nilai indicator kemiskinan paling rendah Cluster 3 terdiri dari 18 provinsi, dengan nilai rata-rata indeks kedalaman (P1) 1.018, indeks keparahan (P2) 0.233 dan presentase penduduk miskin 6.599%.

Tabel 3. Provinsi pada Cluster 3

PROVINSI	P1	P2	P0
SUMATERA UTARA	1.5	0.37	9.28
SUMATERA BARAT	0.99	0.23	6.75
RIAU	0.96	0.19	7.41
JAMBI	0.99	0.19	7.9
KEP. BANGKA BELITUNG	0.56	0.11	5.3
KEP. RIAU	1.18	0.31	6.13
DKI JAKARTA	0.61	0.15	3.78
JAWA BARAT	1.39	0.35	7.83
BANTEN	0.78	0.16	5.59
BALI	0.55	0.12	4.14
KALIMANTAN BARAT	1.02	0.21	7.86
KALIMANTAN TENGAH	0.84	0.2	5.26
KALIMANTAN SELATAN	0.74	0.17	4.7
KALIMANTAN TIMUR	0.87	0.19	6.08
KALIMANTAN UTARA	1.32	0.31	6.96
SULAWESI UTARA	1.3	0.3	7.9
SULAWESI SELATAN	1.92	0.5	9.48
MALUKU UTARA	0.81	0.15	6.44

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa untuk cluster 1 adalah kelompok provinsi miskin, cluster 2 adalah kelompok provinsi sedang dan cluster 3 adalah kelompok provinsi tidak miskin. Pemerintah terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dengan cara menjalankan program-program yang dirancang untuk menanggulangi kemiskinan. Berikut ini adalah program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Kementerian Komunikasi, 2011).

1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
- a. Tetap mempertahankan program lama seperti:
 - a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
 - b) RASKIN (Beras Miskin)
 - c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
 - d) Asuransi Miskin, dsb
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
4. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
5. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
6. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
7. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
8. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
9. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness.
10. Program pengembangan Kecamatan, Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan diperkuat program-program kementerian/lembaga
11. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan

12. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
13. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
14. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
15. Percepatan pembangunan infrastruktur
16. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
17. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
18. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
19. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
20. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).

Patterns, International Journal of Sports Science and Engineering

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Jakarta

Hair J.F., Black W.C., Babin B.J., Anderson R.E., dan Tatham R.L. 2006. Multivariate Data Analysis, Sixth Edition, Pearson Education, Inc and Dorling Kindersley: India.

Royat, Sujana. 2015. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangguran Kemiskinan. Jakarta

Yacoub, Y. 2010. Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Kalimanta Barat. Jurnal Eksos vol.8 no.3

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa masih banyak provinsi-provinsi di Indoensia yang memiliki indeks kedalamann, indek parahan dan presentase penduduk miskin yang tinggi. Analisis non hierarki cluster mengelompokan provinsi di Indonesia menjadi 3 kelompok. Kelompok provinsi miskin (cluster 1), kelompok provinsi sedang (cluster 2) dan kelompok provinsi tidak miskin (cluster 3).

Penelitian ini merekomendasikan bahwa pemerintah patut untuk memperhatikan wilayah/daerah yang indeks kemiskinannya masih tinggi dan meninjau pemerataan ekonomi di pulau jawa dan diluar pulau jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan.Graha Ilmu.Yogyakarta
- Arsyad. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.BPFE. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. Badan pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta.
- Chen, I., Chen, M.Y., Jin, C., dan Yan, H. 2008. Large-scale Cluster Analysis of Elite Male and Female Swimmers'Race